



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp.
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id
KUPANG

23 Januari 2025

Kepada
Yth. Karo Pemerintahan Setda Provinsi NTT
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 100.1.7/69/Sat Polpp.1.1

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 (Satu) Buku	Di kirim untuk ditindaklanjuti

Demikian Laporan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. PETRUS SERAN TAHUK
Pemahaman Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

WEBSITE : www.satpol-pp.nttprov.go.id

KUPANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaan-Nya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawab (LKPJ) tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024, merupakan Perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2024 pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran terkait kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang Tahun 2024, berdasarkan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut gambaran kinerja tahun ini merupakan implementasi penyelenggaraan Program atau kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. Nusa Tenggara Timur yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang adanya kerjasama dengan instansi terkait.

Harapan kami semoga Pelayanan yang diberikan seluruh tahun 2024 dapat memberikan kesan positif terkait keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ditengah-tengah masyarakat.

Kami juga menyadari segala kekurangan dalam memberikan Pelayanan Kepada masyarakat , saran dan kritik untuk perbaikan Pelayanan kepada masyarakat.

Kupang, 23 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Drs. PETRUS SERAN TAHUK
Pemuda Utama Muda

NIP. 19701231 199101 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi Misi	3
1.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	3
1.4 Data Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur...	5
A Jumlah Aparatur Sipil Negar	5
B Fasilitas/sarana perlengkapan.....	8
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	13
2.1 Anggaran	13
2.2 Realisasi.....	13
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	19
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	19
3.2 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	68
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA 2023.....	97
3.4 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	98
BAB IV PENUTUP	98
A Kesimpulan	98
B Saran	100

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja atau di singkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan layanan dasar dengan tugas utama adalah menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenterman dan ketertiban Umum serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Yang dipercayakan, Satuanh Polisi Pamong Praja berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan Motto "**Tegas, Humanis, Persuasif, Edukatif**". Satuan Polisi Pamong Praja menjadi garda terdepan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tenteraman bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang suku,ras dan agama,laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa.

Untuk itu sebagai garda terdepan yang membantu Kepala Daerah dalam bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat , Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyajikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang nantinya akan menjadi evaluasi bagi seluruh masyarakat terhadap kinerja pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurung waktu 1 (satu) tahun.

1.1 DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana dengan Peraturan Pemerinyah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Penerapan Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi / Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan ke tiga Atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT.

1.2 VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah periode 2005-2025 yang tuangkan dalam Rencana Strategi pembangunan NTT tetang program /kegiatan dan sub kegiatan yang berpihak pada masyarakat khususnya pelaksanaan dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta perlindungan Masyarakat.

Adapun Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi :

“Nusa Tenggara Timur Tang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang aman,nyaman dan tentram atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Misi:

Misi ke-5 yakni “Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan”, agenda butir ke-5 “Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai”. ” Misi ini relevan dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yakni ;

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Menyelenggarakan Ketenteraman,Ketertiban Umum;dan;
- 3) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

1.3 GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Satuan Polisi Pamong Praja Secara kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atau disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan untuk teknis Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelayanan yang wajib diberikan adalah Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam radius 0- 50 meter dengan ruang lingkup pelayanan meliputi:

1. Mutu Pelayanan Dasar;
2. Kriteria Penerima, dan;
3. Tata Cara Pemenuhan Standar.

Mutu pelayanan dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar masyarakat dapat hidup secara layak. Mutu layanan tersebut terdiri dari :

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, dan;
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat mutu layanan tersebut wajib dilaksanakan dalam pencapaian 100% Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, melalui tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai berikut :

1 Tugas

- a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Gubernur (Pergub);
- b. Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

2 Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ perkara; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda dan/ perkara

1.4 DATA UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan pangkat Eselon II/a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang jumlah pegawai 129 orang dengan kondisi dan kualifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi Aparatur Sipil Negara (Pegawai) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Terisi	Lowong
1.	2	3	4	5
2.	Kepala Satuan Pol. PP	1	1	-
3.	Sekretaris	1	-	1
4.	Kepala Bidang	4	3	1
5.	Kepala Seksi	8	6	2
6.	Kepala Sub Bagian	3	3	-
7.	Jabatan Fungsional Pol PP	63	63	-
8.	Jabatan Fungsional Umum	23	23	
9.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendagri (IPDN)	1	1	
10.	Tenaga Honorer	29	29	-
	Jumlah	133	129	4

2. Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai per 31 Desember 2024 yper 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	6
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	63
7.	Anggota Satpol PP PNS	23
8.	CPNS Kemendagri	1
9.	Tenaga Honorer	29
Jumlah		129

3. Golongan kepangkatan sampai bulan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	7
1.	Golongan IV	4	-	4
2.	Golongan III	49	10	59
3.	Golongan II	32	5	37
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		85	15	100

4. Jenjang pendidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja yakni ;

Data Keagamaan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
Pasca Sarjana (S2)	3	-	3
Sarjana (S1)	44	18	61
Diploma	-	-	-
SMU/SMK	55	10	64
Jumlah	100	28	129

5. Jenis Keagamaan pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	6		5
2.	Kristen	72	22	94
3.	Katholik	20	9	29
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		98	31	129

6. Data Cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Kepangkatan/Golongan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	35 orang
3.	Golongan II	12 Orang
Jumlah		47 Orang

7. Data sanksi hukuman disiplin Kepegawaian per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Hukuman Disiplin Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	Orang
2.	Golongan III	8 Orang
3.	Golongan II	3- orang
4.	Banpol	- Orang
Jumlah		11 Orang

B Fasilitas/sarana perlengkapan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik dikantor maupun dilapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang tuangkan dalam dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

SARANA PRASARANA PENDUKUNG

No.	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaa n Barang	Tahun Pengadaa n
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW)	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2.	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3.	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4.	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5.	Air Condition	Besi /National/1Pk	2	Buah	B	2008
6.	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7.	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8.	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10.	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11.	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12.	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13.	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14.	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15.	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16.	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009

17.	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18.	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009
19.	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20.	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21.	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22.	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23.	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24.	Meja Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25.	Kursi Kerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27.	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28.	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29.	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30.	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31.	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32.	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33.	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34.	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35.	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36.	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37.	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38.	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39.	Layar Proyektor		1	Buah	B	2012
40.	Meja Pimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41.	Meja Kerja	Kayu	6	Buah	B	2013

42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013
45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirellesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014

64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015
71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017

92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes	Besi	1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS	Kayu	1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi	Kayu	1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi1	Tripleks	1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi	Spanduk/baliho	1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi	Tripleks	1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Mobil Truck (STCK DH.8279-WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
110	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 ANGGARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam tahun 2024 anggaran tersedia dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja TA 2024 DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001.2024, mendapatkan pagu sebesar Rp. 11.632.976,930.- (sebelas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) berikut

kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang telah dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1	Belanja Operasi	11.632.976.930	DAU/PAD
2	Belanja Pegawai	9.525.879.050	DAU
3	Belanja Barang dan Jasa	2.107.097.880	PAD

2.2 REALISASI

Dari Pagu Anggaran tersebut Satuan Polisi pamong Praja dalam tahun 2024 alokasi anggaran dan realisasi Anggaran dipertanggungjawabkan setiap bulan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 pada Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan tabel SP2d dan dan SPJ sebagai berikut;

Berikut data realisasi program/kegiatan sub kegiatan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut :

Program / Kegiatan	DPPA	Realisasi		Sisa Anggaran	Prosentase (%)	
		SP2D	SPJ		Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.632.976.930	10.789.357.829	10.789.357.829	843.619.101	92,75	92,75
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	10.785.945.930	10.056.096.488	10.056.096.488	729.849.442	93,23	93,23
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000,-	37.988.000	37.988.000	12.000	99,97	99,97
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000,-	37.988.000	37.988.000	12.000	99,97	99,97
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.505.179.050,-	8.872.817.996	8.872.817.996	632.361.054	93,35	93,35
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.505.179.050,-	8.872.817.996	8.872.817.996	632.361.054	93,35	93,35
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.000.000,-	-	-	12.000.000	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Kelengkapannya	12.000.000,-	-	-	12.000.000,-	-	-

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	124.635.000,-	93.324.663	93.324.663	31.310.337	74,88	74,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	1.909.280	1.909.280	3.090.720	38,19	38,19
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.177.000,-	21.405.200	21.405.200	3.771.800	85,02	85,02
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-	100	100
Penyediaan Bahan Material	25.000.000,-	16.720.807	16.720.807	8.279.193	66,88	66,88
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,-	4.998.000	4.998.000	2.000	99,96	99,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.458.000,-	28.291.376.	28.291.376.	16.166.624	63,64	63,64
Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000,-	18.000.000,-	18.000.000,-	-	100	100
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.880,-	962.405.451	962.405.451	34.626.429	96,53	96,5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000,-	1.400.000	1.400.000	-	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,-	5.724.800	5.724.800	4.275.200	57,25	57,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880,-	955.280.651	955.280.651	30.351.229	96,92	96,92

	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	209.100.000,-	89.560.378	89.560.378	19.539.622	82,09	82,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000,-	67.702.878	67.702.878	2.297.122	96,72	96,72
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000,-	9.777.000	9.777.000	9.323.000	51,19	51,19
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,-	12.080.500	12.080.500	7.919.500	60,40	60,40
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	840.031.000,-	726.261.341,-	726.261.341,-	113.769.659	86,46	86,46
	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	704.965.000,-	638.301.341	638.301.341	66.663.659	90,54	90,54
	Kerja Sama Antr Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan Antr Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	-	100	100
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	-	100	100

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	63.545.000,-	62.410.000	62.410.000	1.135.000	98,21	98,21
Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000,-	53.496.000	53.496.000	21.504.000	71,33	71,33
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100	100
Pencegahan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	333.1000.000,-	319.095.381	319.095.381	14.004.619	95,80	95,80
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis, termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000,-	116.163.960	116.163.960	14.836.040	88,67	88,67
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	93.320.000,-	78.136.000,-	78.136.000,-	15.184.000	83,73	83,73
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000,-	82.960.000	82.960.000	7.040.000	92,18	92,18

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur	5.000.000,-	3.000.000	3.000.000	2.000.000	60,00	60,00
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	70.000.000,-	65.000.000	65.000.000	5.000.000	92,86	92,86
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000,-	14.960.000	14.960.000	40.000.000	99,73	99,73
PEMBINAAN PENYIDIK PEGWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	45.066.000,-	5.000.000	5.000.000	40.066.000	11,09	11,09
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	45.066.000,-	5.000.000	5.000.000	40.066.000	11,09	11,09
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-		100	100
Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000,-	5.000.000	5.000.000		100	100
Penyediaan informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000,-	2.000.000	2.000.000	-	100	100

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progress baik fisik maupun keuangan Tahun 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp.10.789.363.829 (sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh sembilan Rupiah) atau 92.75% dari total pagu sebesar Rp. 11.632.976.930 (sebelas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah)

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) Provinsi NTT. Jumlah total Anggaran sebesar Rp. 11.632.976.930,- yang terdiri dari 3 (tiga) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran dan Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan Realisasi sebagai berikut;

No	URUSAN / PROGRAM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentae (%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.632.976.930,	10.789.357.829	92,75
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.785.945.930,	10.056.096,488	93,23
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	840.031.000,-	726.261.341	86,46
3	Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	7.000.000,-	7.000.000	100

RUMUSAN INDIKATOR YANG DI TETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	Realisasi	FARMASI RUMUSAN
			2023	2024	2024		
1	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76 %		100%	Jumlah Kegiatan Pengamanan 127 Kali serta masyarakat mendapat Pelayanan 2.283 Orang capaian 100%	$\frac{(\text{Jumlah kegiatan yang diselesaikan})}{\text{Target}} \times 100 \%$
		2. Presentase Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3		3	2 (dua) Perda dan 1 (satu) Pergub	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang di tegakan}}{\text{Jumlah Perda Perkada}} \times 100$
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun Kebakaran setiap tahun	-		100%	100%	$\frac{(\text{Data Daerah Potensi Rawan Kebakaran})}{\text{Jumlah Wilayah}} \times 100$

3.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN KELUARAN DOKUMEN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

	KEBIJAKAN	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PERMASALAHAN
	URUSAN					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	RP. 840.031.000 ,-	Rp. 726.261.341 (86,46) %		
1	PROGRAM					
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.840.031.000,-	Rp.726.261.341,-(86,46)%		
A	KEGIATAN					
		Terlaksananya Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	Rp. 704.965.000,-	RP. 638.301.341,-(90,54)%	Secara Umum masalah pada Kegiatan ini yakni : 1. Masih perlu peningkatan tugas Pengaturan, (TURJAWALI) dalam melakukan Pembekalan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fungsi dan tugas serta Peningkatan Sumber daya Aparatur 2. Masih terdapat ASN yang sewa Rumah Dinas belum melunasi Pembayaran . 3. Masih terdapat Masyarakat yang Okupasi dan memasang Plang pada Aset tanah Prov.di kab Kupang	1.Sat Pol PP selalu memaksimalkan Rapat Evaluasi kinerja untuk meningkatkan fungsi Tugas. 2.Sat Pol PP bersama Badan Aset Prov.NTT melakukan Teguran dan Penertiban 3.Sat Pol PP dan Badan Aset melakukan Penertiban Plang di Lokasi Aset Tanah Prov.NTT

		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
		4. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui deteksi dini, dan cegah dini ,pembinaan dan penyuluhan , Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		
			Outcome	Outcome		
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli) Pengamanan Aset milik Provinsi selama 1 x 24 jam dalam 1 (satu) tahun yang di bentuk dalam 3 regu untuk 5 (Lima) titik pos Penjagaan Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT yakni : a. Pos Kantor Gubernur NTT (Gedung Sasando) b. Pos Rumah Jabatan Gubernur; c. Pos Rumah Jabatan Wakil Gubernur; d. Pos Rumah Jabatan Sekretaris Daerah; e. Pos Kantor Satpol PP Provinsi NTT	Masih perlu peningkatan tugas Pengaturan, (TURJAWALI) dalam melakukan Pembekalan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fungsi dan tugas serta Peningkatan Sumber daya Aparatur	Sat Pol PP selalu memaksimalkan Rapat Evaluasi kinerja untuk meningkatkan fungsi Tugas.
		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		

		5. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
			Outcome	Outcome		
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pemantauan Penerbitan Aset milik Pemerintah Provinsi.NTT yang berada di kabupaten/Kota, Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.		

			<p>1) <i>Terlaksananya kegiatan Operasi Penertiban dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Prov.NTT</i></p>	<p>Terlaksananya Operasi Penertiban dan pengamanan serta Pemantauan Aset milik pemerintah Prov. NTT sebanyak 6 Kali dengan masyarakat terlayani 3 kk yakni :</p> <p>1. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan sosialisasi sekaligus memberikan Surat Teguran Penghuni Rumah Dinas atas nama Johan Saekoko untuk Pembayaran Rumah Dinas sebesar 7.700.00 ribu sebanyak 1 kali;</p>	<p>Saudara John Saekoko sebagai ASN tidak melakukan Pembayaran Rumah Dinas</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja bersama Aset memeberikan Surat teguran untuk melunasi Retribus Rumah dinas</p>
				<p>2. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja dan badan Aset melakukan Penertiban kepada Masyarakat (Okupan) sebanyak 4 KK (Yanti,Kusuma,SittiHalija,YosimanBanoet,Khadijah Abubakar Yakni Saudara Nofri yang melakukan Aktivitas (membangun kios) di Aset tanah Prov.NTT di lokasi manulai sebanyak 1 kali;</p>	<p>Masyarakat melakukan aktivitas (membuat Kios dalam Area Rumah Sakit Memboi Manulai II</p>	<p>Satuan Polisi bersama Aset melakukan Penertiban 4 KK PKL yang membangun kios di lokasi Rumah Sakit Memboi Manulai II</p>

			<p>3. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Badan Aset untuk melakuakn pengamanan penerahan surat peringatan ASN dinas perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan Pembayaran Penundaan rumah Dinas atas nama saudara Abiel Klaping sebanyak sebanyak 1 kali;</p> <p>4.</p>	<p>Pegawai atas nama saudara Abiel Klaping Penundaan Pembayaran Sewa Rumah dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Surat Peringatan untuk pemebayaran ketika tidak melunasi maka akan melakukan penertiban</p>
			<p>5. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan Pengamanan dan penertiban Masyarakat yang melakukan pemamfaatan Aset tanah dan gedung Lokabinkra Prov.NTTT di lokasi Jalan Timor Raya KM 8 Kel Oesapa Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p>	<p>Masyarakat melakukan aktivitas (membuka Kios dalam 1 buah Gedung Lokabinkra di Oesapa</p>	<p>Satuan Polisi pamong Praja bersama badan Aset melakukan pendekatan persuasif dan penertiban</p>

				<p>6. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan Pengamanan Masyarakat Okupasi Aset tanah Prov.NTT sekaligus Penertiban pemasangan Plan di aset milik Prov.NTT dilokasi Desa Mata Air Kab Kupang sebanyak 1 Kali.</p>	<p>Masyarakat melakukan Aktivitas dalam Aset Tanah Prov.NTT di Desa Mata Air kab Kupang dan memasang Plang Tanah kepemilikan</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja bersama Sat pol PP kabupaten kupang bersama badan Aset melakukan Penertiban palng yang di pasang oleh masyarakat</p>
				<p>7. Terlaksananya pemantauan sekaligus Patroli serta Pemantauan Aset milik Prov.NTT yakni Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, Aset Tanah di bajadek, Kota Kupang sebanyak 2 kali;</p>	<p>Aset Tanah di bajadek Masih di okupasi Masyarakat</p>	<p>Satuan Polisi melakukan pendekatan persuasif tetapi mereka menuntut untuk menerbitkan sertifikat Hak pakai yang dikeluarkan oleh pemerintah prov.NTT</p>

				8. Terlaksananya Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Badan Aset milik Prov.NTT melakukan penertiban 1 KK Pegawai Rumah Sakit Umum W.Z Yohanes untuk mengosongkan (Mess Pegawai RSUD Prov Dr W.Z Yohanes Kupang sebanyak 1 kali;	PNS pada Rumah Sakit Umum selama tinggal di Rumah Dinas tidak membayar retribusi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Aset dan badan pengurus Rumah Sakit Umum melakukan Penertiban
			2) <i>Terlaksananya Pengamanan Forkopinda Daerah dan Tamu VIP dan VVIP dan tamu penting yakni;</i>	Terlaksananya kegiatan Pengamanan Pejabat VVIP dan VIP dan tamu penting lainnya berjumlah 29 kali dengan jumlah pejabat yang mendapat pengawalan, pengamanan sebanyak 650 Orang hasilnya		
				1. Melakukan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Gubernur. NTT dalam rangka patroli pemantauan pencoblosan pemilu tahun 2024 lokasi Perumnas (kota Kupang) sebanyak 1 kali; 2. Melakukan pengamanan Gladi Kotor dan Bersih dalam Persiapan Pelantikan Pejabat Bupati Rote Ndao manggarai Timur, TTS di lokasi Aula El Tari Kupang sebanyak 1 Kali;		

				<p>3. Melakukan pengamanan Pelantikan Penjabat Bupati Rote Ndao manggarai Timur, TTS di lokasi Aula El Tari Kupang jumlah peserta 150 orang sebanyak 1 kali;</p> <p>4. Melakukan Pengamanan Tim dari Kementrian Dalam Negeri untuk membahas upacara penyelesaian Tumpang tindih hak pada tanah sertifikat di lokasi Stasiun Bumi (Getaway jaringan Satelit RI di Kupang) di lokasi manulai II (Rumah Sakit Nasional Ben Mboi);sebnyak 1 kali.</p> <p>5. Melakukan pengamanan dalam rangka penguhan dan pelantikan pejabat pimpinan Tinggi pratama linkup Prov.NTT di Lokasi Aula fernandes sebanyak 1 kali;</p> <p>6. Melakukan Pengamanan kegiatan RUPS (rapat Umum Pemegam Saham Iflasi dan Pergantian Direksi Bank NTT di aula El Tari sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>7. Melakukan Pengamanan Kegiatan jamuan makan malam Pj Gubernur dan Uskup agung kupang dbeserta undangan jumlah 500 orang di lokasi kantor Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>8. Melakukan Pengamanan Kunjungan Kerja PJ Gubernur di lokasi Bank NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>9. Melakukan persiapan Pengamanan Gladi bersih dan kotor Pelantikan PJ Lembata dan Flotim di aula El Tari sebanyak 1 Kali</p> <p>10. Melakukan Pengamanan Pengambilan Sumpah jabatan pelantikan flores Timur dan Lembata di Aula El Tari sebanyak 1 kali</p> <p>11. Melakukan Pengamanan Jamuan Makan Malam PJ dan Forkopinda NTT di Rumah jabatan Gubernur Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>12. Melakukan Pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Sumba Barat Daya di lokasi Aula El tari Kupang sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>13. Melakukan Pengamanan syukuran Pelantikan Pejabat Bupati Sumba Barat Daya di Lokasi Aula El tari sebanyak 1 kali</p> <p>14. Melakukan pengamanan dan mengikuti kegiatan Deklarasi Netralisasi ASN/TNI Polri Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di prov.NTT di lokasi Aston Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>15. Melakukan Pengamanan dan mengikuti Undangan Apel Gelar Pasukan pengamanan dalam rangka Kunker Presiden RI dan Rombongan ke Wilayah NTT di lokasi wirasakti kupang; sebanyak 1 kali;</p> <p>16. Melakukan Pengamanan PJ Gubernur NTT dalam rangka kunjungan Kerja di lokasi Qi Bolok, PT.Flobamora ,Bank NTT, jam Krida , Gereja Menara Kesaksian Fatululi sebanyak 5 kali;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>17. Melakukan pengamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat paripurna peresmian peresmian pengambilan sumpah sumpah janji pimpinan DPRD Prov. NTT masa jabatan tahun 2024-2029 dan Tamu Tamu dari RI dan Konsultan RDTL sebanyak 1 kali;</p> <p>18. Melakukan Pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Nagekeo, oleh pejabat Gubernur NTT dan Tamu undangan Lainnya sebanyak 1 kali;</p> <p>19. Melakukan Pengamanan dan Pengawasan kunjungan Kerja meneteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bapak Pratikno Bandara El tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>20. Melakukan Pengamanan Forkompinda dan bidang teknis penanganan Bencana dan mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Pasca bencana Eropsi Gunung Lewotobi laki-laki dan Konflik Sosial di kab Flotim diruangan PJ gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>21. Melakukan patroli bersama TNI Polda NTT dan Pengamanan PJ Gubernur dalam Rangka Pemantauan Pemungutan suara di Kota Kupang dan oesao (kab Kupang) TPS.-TPS sebanyak 2 kali;</p> <p>22. Melakukan Pengamanan Tamu VVIP Area Acara kegiatan Parade Tenun ikat NTT serentak di Prov.NTT Sepanjang jaln El tari dan Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 kali;</p> <p>23. Melakukan pemantauan pengawalan dan patroli bersama Forkopinda dalam rangka pengecekan pos pengamanan malam pergantian tahun 2024-2025 di wilayah Kota Kupang;</p> <p>24. Melakukan pengamanan dan pengawalan PJ Gubernur dan patroli penertiban Baliho bersama Pol PP Kota di kota Kupang di Kota Kupang;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			3) <i>Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Demonstrasi Aksi Unjuk Rasa</i>	Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga Ketenteraman dan ketertiban Umum yakni menjaga Demostrasi Aksi unjuk rasa dari masyarakat dan mahasiswa di Kantor Gubernur dan DPRD sebanyak 14 kali dengan jumlah masyarakat dan mahasiswa yang mendapat pelayanan sebanyak 720 Orang dengan rincian kegiatan sebagai berikut;	Masyarakat menuntut Kebijakan pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Polda dan Polresta untuk melakukan pengamanan sekaligus melakukan koordinasi dengan Pejabat atau DPRD untuk melakukan Audens
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengamanan Aksi unjuk rasa dari LMND (liga mahasiswa Nasional untuk Demonstrasi Eksekutif Kota Kupang terkait kasus Tenaga Kerja Kesehatan di depan kantor Gubernur NTT Jumlah Pendemo sebanyak 30 Orang; sebanyak 1 kali; 2. Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa /demonstrasi Konferensi Serikat Buruh sejarah indonesia (KSBSI) jumlah masyarakat dan mahasiswa sebanyak 200 Orang di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali 		

				<p>3. Melakukan Pengamanan aksi unjuk Rasa Demonstrasi mahasiswa Nasional (From Mahasiswa (FMN) terkait Milik Warga kab Lembata di depan kantor gubernur Jumlah Pendemo 60 Orang sebanyak 1 kali;</p> <p>4. Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa demonstrasi dari mahasiswa terkait Upah buruh di kab manggarai berjumlah 65 orang depan kantor Gubernur NTT sebanyak 2 kali;</p> <p>5. Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa demonstrasi mahasiswa dari aliansi FMN terkait Farmasi Akpol di DPRD prov.NTT berjumlah (30 Orang) sebanyak 1 kali;</p> <p>6. Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /demonstrasi tentang Penolakan Rektor IAKN Kupang dari Luar NTT jumlah pendemo 30 orang di DPRD prov.NTTsebanyak 2 kali;</p> <p>7. Melakukan Pengamanan Demonstrasi dari mahasiswa FMN dan masyarakat di DPRD Prov.NTT berjumlah 35 Orang sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>8. Melakukan pengamanan Aksi unjuk Rasa /demonstrasi dari wartawan terkait penolakan Undang-undang OPERS. Jumlah 10 Orang di depan kantor gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>9. Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /Demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat Besipae (jumlah pendemo 100 Orang) depan kantor Gubernur NTT;sebanyak 1 Kali;</p> <p>10. Melakukan pengamanan Aksi unjuk rasa Demonstrasi dari fraksi Mahasiswa dari Undana Terkait penolakan geothermal di wilayah adat poco leok di manggarai Jumlah pendemo 50 orang di DPRD prov.NTT sebanyak 2 kali;</p> <p>11. Melakukan Pengamanan demonstrasi Aksi unjuk Rasa Forum mahasiswa dari undana terkait Terkait dengan Mafia BBM di NTT di DPRD Prov.NTT Jumlah 35 orang sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				12. Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /Demostrasi dari Forum Mahasiswa dan Aliansi LMND jumlah Pendemo 30 Orang di DPRD prov.NTT sebanyak 1 kali;		
			4) <i>Terlaksananya Pengamanan dan Patroli Hari – hari besar Keagamaan dan Nasional</i>	Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga Ketenteraman dan ketertiban Umum di hari besar Keagamaan dan hari besar Nasional sebanyak <i>17 kali</i> , dengan rincian kegiatan sebagai berikut;		Satuan Polisi Pamong Prov.NTT bekerordinasi dengan Pol PP Kota Kupang dan bekerja Sama dengan Polri untuk melakukan pemantauan , dan Patroli
				1. Melakukan Pengamanan Upacara HUT RI HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di lokasi depan lapangan Walikota Kota Kupang sebanyak 1 kali; 2. Melakukan Operasi dan patroli serta pemantauan gabungan dalam rangka Mantap Brata Turangga dalam menjelang idul Fitri sebanyak 1 kali;		

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan Operrasi Patroli dan pemantauan gabungan bersama Kapolda NTT dalam rangka malam Takbiran Hari raya Idul Fitri 1445 H sebanyak 1 kali; 4. Melakukan Pengamanan dalam Rangka Acara Anak nasional tahun 2024 di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali; 5. Melakukan Pengamanan Renungan suci dalam rangka memperingati HUT RI ke 79 kemerdekaan indonesia sebanyak 1 kali; 6. Melakukan Pengamanan dalam rangka memperingati hari Lahir pancasila di Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 Kali; 7. Melakukan Pengamanan kegiatan memperingati hari lanjut Usia Nasional ke 28 tahun dan hari Lanjut Usia Prov.NTT ke 11 di lokasi depan kantor Gubernur prov.NTT sebanyak 1 kali; 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>8. Melakukan pengamanan dalam rangka Kegiatan Sholat Idul Adha 1445 H tahun 2024 di lokasi Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>9. Melakukan Pengamanan rangka Detik –detik memperingati HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Alun – alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>10. Melakukan Pengamanan Penurunan dalam bendera Merah Putih HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Alun – alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>11. Dalam Melakukan Pengamanan kupang Exotic Run Tahun 2024 dalam rangka lomba lari 5K dan 10 K dan festival depan kantor Gubernur Jalan El tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>12. Melakukan Pengamanan untuk menjaga Trantibum dalam rangka gladi Pengambilan janji Sumpah anggota DPRD Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>13. Melakukan Pengamanan untuk menjaga gladi Pengambilan janji Sumpah anggota DPRD Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>14. Melakukan Pengamanan dan Mengikuti Apel Memperingati hari Perhubungan nasional TK Prov.NTT sekaligus di satukan bapel kesadaran Llingkup Prov.NTT lokasi terminal Type A bimoku Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>15. Melakukan Pengamanan dalam rangka Upacara Peringatan hari Pahlawan Nasional di lokasi Darmaloka pasir panjang Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>16. Melakukan Pengamanan dalam rangka Upacara Peringatan hari Pahlawan Nasional diAlun –alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>17. Melakukan Pengamanan Upacara Hari Korpri Nasional di depan halaman kantor Gubernur NTT di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			5) Terlaksananya Pengamanan dan Penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengamanan dan Penertiban bagi ASN yang mengikuti Apel Kesadaran dari 39 Perangkat daerah di Depan kantor Gubernur . NTT setiap tanggal 17 dalam bulan berjalan 12 kali; 2. Melakukan Pengamanan mencegah gangguan Trantibum bagi ASN Pada Jam Dinas di Dinas Perikanan sebanyak 1 kali; 3. Melakukan Penertiban ASN yang Mabuk Di UPTD sesuai Pengaduan Ibu Yolanda PNS di UPTD di taman Budaya dinas PK Prov.NTT sebanyak 1 Kali 	ASN UPTD mabuk di Kantor UPTD Taman Budaya	Satuan Polisi Pamnong Praja melakukan penertiban dan pengamanan dan membuat Surat Peringatan.
			6) Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 60 Kali dengan masyarakat yang terlayani 910 Orang dengan hasilnya		Sat Pol PP Rutin berkoordinasi dengan Polda dan Polresta dalam menjaga Trantibum dalam
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengamanan deteksi dini dan Cegah dini Gangguan untuk menjaga Trantibum dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa /Rohani bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian Kinerja (P3K) rumah Sakit Jiwa sebanyak 1 kali; 		

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan Pengamanan deteksi dini dan Cegah dini untuk menjaga Gangguan Trantibum dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa /Rohani bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian Kinerja (P3K) sebanyak 515 Orang di lokasi rumah sakit jiwa sebanyak 1 Kali; 3. Melakukan pengamanan untuk menjaga trantibum terhadap tindakan persuasif dan Penertiban PKL serta Pemindahan bagi pedagang kaki (PKL) lima yang berjualan di samping kantor gubernur NTT sekaligus memindahkan ke tempat yang di sediakan sebanyak 2 kali; 4. Melakukan Pengamanan dalam menjaga Trantibum dalam rangka Gladi bersih bersama sat polpp kota kupang dalam rangka upacara gelar pasukan HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di lokasi depan Lapangan Wali Kota Kupang sebanyak 1 kali; 5. Melakukan Pengamanan dalam menjaga trantibum untuk mengikuti gelar pasukan HUT upacara gelar pasukan HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di depan halaman Kantor walikota Kupang sebanyak 1 kali; 		
--	--	--	---	--	--

			<p>6. Melakukan Pengamanan dan menjaga Trantimum dalam rangka Gladi Kotor dan bersih dalam rangka memperingati hari Lahir pancasila di Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 Kali;</p> <p>7. Melakukan Pengamanan dalam menjaga Trantibum Olah Raga Tingkat Prov.di depan kantor Gubernur Sasando sebanyak 1 kali;</p> <p>8. Melakukan Pengamanan dalam rangka menjaga Trantibum dalam rangka Penyerahan SK P3k oleh Setda bagi 145 orang untuk guru SMA,SMK,dan SLB tingkat Prov.NTT di depan halaman kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>9. Melakukan Pengamanan dan menjaga trantibum dalam Gelar Pasukan Operasi Turangga untuk menjaga ketenteraman dan Ketertiban Umum di kota kupang di lapangan polda NTT;</p> <p>10. Melakukan Pengamanan dalam rangka menjaga Trantibum dalam Rapat Operasi DBH-CHT (dana Bagi hasil Bea Cukai Rokok 4 kali;</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>11. Melakukan Pengamanan Pari Purna di DPRD Prov.NTT dalam menjelang terakhir DPRD Prov.NTT sebanyak 20 kali;</p> <p>12. Melakukan Pengamanan Penganugrahan tanda Kehormatan Satya Lencana Karya 10 Tahun 20 tahun dan 30 tahun tahun 2024 di aula El Tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>13. Melakukan Pengamanan Pelepasan Kontigen NTT menuju PON XXI /2024 Aceh Sumut di aula El tari Kupang sebanyak 1 Kali;</p> <p>14. Dalam Melakukan Pengamanan kupang Exotic Run Tahun 2024 dalam rangka lomba lari 5K dan 10 K dan festival El Tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>15. Melakukan Pengamanan gladi dalam rangka memperingati Detik –detik HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Aula jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>16. Melakukan Pengamanan Kegiatan Turnamen Voly Putra antar Perusahaan Daerah (BUMD, BUMN se Kab/Kota Prov.NTT Kantor Gubernur Lama jl Basuki Rahmat prov.NTT sebanyak 6 kali;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>17. Melakukan Pengamanan Olah Raga Tingkat Prov.di depan kantor Gubernur Sasando sebanyak 1 kali;</p> <p>18. Mengikuti rapat Persiapan Trantibum terkait hari kesaktian pancasila tahun 2024 tingkat prov.NTT di Ruang Asisten senbanyak 1 Kali</p> <p>19. Melakukan Pengamanan Gladi Resik dalam rangka memperingati HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di alun –Alun Rumah Jabtan Gubernur NTT.sebanyak 1 kali;</p> <p>20. Melakukan Pengamanan untuk menjaga Trantibum dalam rangka Gladi sekaligus Operasi Mantap Praja Turangga 2024 NTT dalam rangka Pemilukada di lapangan Polda NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>21. Melakukan Pengamanan Sosialisasikan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di lokasi Biskop Plasa Hotel sebanyak 1 kali;</p> <p>22. Melakukan Pengamanan dan mengikuti Latihan Posko I tatap muka II korem 161 Wirasakti sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>23. Melakukan pengamanan dan mengikuti Gelar pasukan dalam rangka Operasi zebra Turangga 2024 di lapangan Polda NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>24. Melakukan dan mengikuti kegiatan latihan Penanggulangan Berencana alam Di Lokasi Korem 161 Wirasakti kupang sebanyak 1 kali ;</p> <p>25. Melakukan Pengamanan dan mengikuti SKD CPNS lingkup prov.NTT tahun 2024 di BKD Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>26. Melakukan Pengamanan Gladi Upacara Hari Korpri Nasional di depan halaman kantor Gubernur NTT di depan kantor Gubernur prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>27. Melakukan Pengamanan sekaligus mengikuti Upacara Ziarah di lokasi Darmaloka pasir panjang kota sebanyak 1 kali;</p> <p>28. Melakukan patroli Gabungan bersama TNI,polda NTT dan Pemantauan deteksi dini ,cegah dini gangguan Trantibum dalam rangka rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemungutan suara di TPS sekaligus pengecekan Kesiapan Pengamanan Tahap Pengumutan suara di wilayah kota Kupang sebanyak 1 kali;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>29. Melakukan Pengamanan Kegiatan DWP Prov.NTT (Perekam KTP Elektronik Aktivitas Identitas Kependudukan Digital dan Kartu identitas Anak serta Geiatan Donor Darah sebanyak 1 kali;</p> <p>30. Melakukan penagamanan dan Mengikuti Kegiatan Apel Kesadaran dan Gelar pasukan dalam Rangka Siaga bencana Tahun 2024 sebanyak 1 kali;</p> <p>31. Melakukan Pengamanan dan mengikuti UpacaraPenerimaan SATGASPUR yunif 74 Garuda nusantara dalam rangka tugas operasi pamtas RI –RDTL periode 2024-2025;</p> <p>32. Melakukan pengamanan kegiatan jalan santai dan pengamanan panggung hiburan oleh kurang lebih 250 orang serta penyandang Sabilitas di kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>33. Melakukan Pengamanan rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pilkada;</p> <p>34. Melakukan pengamanan pemberian bantuan bagi anak asuh di kelurahan lasianan;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				35. Melakukan Pengamanan rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pilkada		
			7) Terlaksananya Operasi reaksi cepat	Terlaksananya Operasi reaksi cepat sebanyak 1 Kali dengan hasilnya;	Sat Pol PP belum memiliki Sarana Prasarana Pendukung Damkar	Sat Pol PP berkoordinasi dengan Damkar Kota Kupang untuk membantu dalam pemadam kebakaran
				1) Melakukan pengamanan Kebakaran kantor UPTD pertanian UPTD Dinas Pertanian Prov NTT di Lokasi air Nona sebanyak 1 Kali	Sat Pol PP Prov.NTT belum melakukan memiliki Sarana Prasarana Damkar	Sat Pol PPProv.NTT sebatas melakukan koordinasi dengan Damkar Kota,dan pengamanan

		Sub Kegiatan	Out put :	Out put :		
		4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan ketenteramn dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
			Outcome	Outcome		
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan Rapat koordinasi Konsolidasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Satuan Polisi Pamong Praja se - Kabupaten/Kota untuk menjaga Ketententeraman dan Keteriban Umum dalam rangka Pemilukada Presiden dan wakil Presiden dan DPRD, DPD,DPRD RI, serta Pemilukada Bupati dan Wali Kota di hotel Pelangi Kupang sebanyak 1 Kali;		Sat Polpp Prov.NTT Sudah melakukan Koordinasi se Sat Polpp kabupaten /Kota untuk menjaga Trantibum selama Pemilukada

		Sub Kegiatan	Out put :	Out put :		
		5. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pencegahan kejahatan		Sat Pol PP tetap berkoordinasi dengan Mitra untuk menjaga Trantibum, Penertiban
			Outcome	Outcome		
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi Lintas kemitraan terkait Penertiban Aset milik Prov.NTT bersama badan Aset milik Prov.NTT tertkait (Rumah Dinas dan Aset tanah lainnya yang di okupasi oleh masyarakat, baik di Kota Kupang dan kabupaten kupang; 2. Terlaksananya koordinasi Lintas kemitraan yakni Kepolisian Nusa Tenggara Timur (Polda.NTT) serta Polresta Kupang Kota terkait Trantibum, pengamanan Demonstrasi di Kantor Gubernur Dan DPRD Provinsi NTT 	Masih lemah Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah	Sat Pol PP tetap melakukan koordinasi dengan Stekholder lainnya untuk pencegahan Trantibum

				3. Terlaksananya dan Mengikuti Rapat Koordinasi Rapat kerja sama Operasi menjelang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada , kabupaten/kota dan juga Operasi Menjelang pergantian Tahun 2024- 2025 di wilayah kota Kupang bersama Forkopinda Daerah Prov.NTT.		
		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
		6. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP ketertiban Umum dan Ketenteramn Masyarakat yang telah di buat dan di muktahirkan		
			Outcome	Outcome		
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Terlaksananya Penyusunanan revisi Standar Operasional Prodedur (SOP) teknis dan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan Desk bersama Tim Penyusunan SOP Biro Organisasi terkait revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2024	Revisi Kembali SOP teknis dan Administrasi	Sat Pol PP sudah melakukan TIM Penyusunan SOP Revisi

		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
		7. Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Belum terdata Masyarakat yang mendapat dampak Penegakan perda di Aset – Aset Tanah Prov.NTT	Sat Pol PP melakukan pengambilan data di Lokasi Manulai II,bajadek,Besipae , Gor Oepoi
			Outcome	Outcome		
			Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya pengambilan data masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda dan perkada di Radius 0-50 Meter di sekitar lokasi Qi Bolokdan hasilnya ;	Masyarakat masih terdapat dampak penegakan Perda pada aset Tanah Bolok, Bajadek.	Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan badan Aset untuk mengukur ulang atau mensosialisasi secara utuh untuk mengetahui batas tanah milik Prov.NTT
				1. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Bajadeksebanyak 19 KK jumlah masyarakat 101 Orang		

				2. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkara di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Besipae sebanyak 23 KK jumlah masyarakat 136 Orang		
				3. Terlaksananya Sosialisasi Fungsi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Lurah Manulai II sekaligus Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkara di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Manulai II (rumah Sakit Umum Nasional Ben Mboi) di RT 14,15,22,23 Kota Kupang; jumlah kk 25 KK dan Jumlah masyarakat 108 Orang;		
				4. Terlaksananya Sosialisasi dan pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkara di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset milik prov.NTT di Gor Oepoi Kupang jumlah kk sebanyak 11 KK dan jumlah masyarakat 68 orang;		

				<p>5. Aset Tanah Qi Bolok Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT melakukan Sosialisasi Standar pelayanan Minimal (SPM) dan mendata masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter dari hasil masyarakat maka Toko Adat dan masyarakat bersepakat membuat Pernyataan yakni</p> <p>a. Masyarakat Desa bolok merasa resah terhadap beredarnya informasi terkait sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lahan kawasan yang mana belum semua lahan dilakukan penyelesaian Pembayaran.</p> <p>b. Masyarakat desa bolok tidak dapat melakukan sertifikasi atas lahan miliknya tanpa rekomendasi dari badan Aset milik pemerinth Prov.NTT</p> <p>c. Masyarakat desa bolok kehilangan hak atas tanahnya</p> <p>d. Menolak untuk menyerahkan data KTP;</p>	<p>Aset Tanah prov.NTT Qi Bolok masih di Kuasai Oleh Masyarakat</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan Siosialisasi dan pendekatan Persuasif untuk meninggalkan Aet tanah namun masyarakat masih menolak</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>e. Meminta Pemerintah daerah / badan Aset Prov.NTT untuk menunjuk batas –batas tanah lokasi kawasan industri bolok</p> <p>f. Meminta Pemerintah daerah / badan Aset Prov.NTT untuk pengukuran ulang sehingga mengetahui mana lahan pemerintah dan masyarakat;</p> <p>g. Masyarakat meminta pemerintah untuk memasang plang pada aset pemerintah prov.NTT agar masyarakat tahu batas kawasan industri bolok</p>		
		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
		8. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
			Outcome	Outcome		
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten Kota yang di hadiri oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo,Belu,Malaka, Ende Manggarai Barat, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Kota Kupang	Masih Lemahnya data anggota Linmas se-Kabupaten/Kota	Sat polpp (bidang Linmas tetap berkoordinasi dengan Sat Pol PP kab/kota untuk

				<p>dari 22 Kabupetn /Kota dan hasil yang di capai dalam Rekomendasi sebagai Berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilukada serentak aman dan damaiyakni ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Tim Satgas Linmas dalam Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024. di Kabupaten/Kota; b. Pemamfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan ,pengawalan Situasi Trantibum linmas melalui Link https://bit.ly/SIKETIMUNMAS Sat Pol Prov.NTT; c. Membangun Koordinasi ,Komonikasi dan Kolaborasi Secara berkelanjutan antara anggota Linmas 2. Invetarisasi Data Linmas Se Kabupaten/ Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian instrumen data Kebutuhan Sarpras 		<p>mendapat data linmas via Wa dan email.</p>
--	--	--	--	--	--	---

		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
		9. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpolpp yang mengikuti Pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Masih lemahnya Anggota memahami tugas dan fungsi	Sat pol PP melakukan Bimtek dan PKS internal
			Outcome	Outcome		
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa hak Asasi Manusia dan hasilnya	Anggota Sat Polpp yang menduduki jabatan Fungsional banyak yang tidak melakukan Uji Kompetensi untuk kenaikan pangkat	Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan bimtek dan berkoordinasi dengan Tim Pusat.
				a. Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami tugas dan fungsi di sertai Latihan Baris Berbaris (Kesemaptaan) di lapangan Sat Polpp Prov.NTT;dengan jumlah peserta 117 orang		

				<p>b. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Jabatan Fungsional di Dirjen Kewilayaan Republik Indonesia;</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Jabatan Fungsional sebanyak 62 anggota.</p>		
B	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	MASALAH	SOLUSI	
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	Rp.90.000.000,-	82.960.000,-(92,18)%	<p>Secara Umum masalah dalam Kegiatan yakni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dan SMK/SMA belum memahami tugas dan fungsi sehingga masih terjadi Pelanggaran Perda dan Perkada 2. Masih terdapat masyarakat membuka usaha tetapi salah peruntukan Pita Rokok/Bea Cukai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan peningkatan sosialisasi di sekolah SMA/ SMK 2. Sat Pol PP dan Instansi terkait melakukan Sosialisasi sekaligus penegkan Produk Hukum 	
	Sub Kegiatan	Out put :	Output :			
	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur.	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah			

			Outcome	Outcome		
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dan ungsi tugas Satuan Polisi pamong Praja di SMA/SMK di Kota Kupang.	Masyarakat dan SMK/SMA belum memahami tugas dan fungsi sehingga masih terjadi Pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan peningkatan sosialisasi di sekolah SMA/SMK
		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
		2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
			Outcome	Outcome		
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Terlaksananya Kegiatan pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Peraturan Gubernur (PERGUB)	Pelaku Usaha salah masih salah Peruntukan Pita Bea Cukai Rokok	Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan operasi selalu

				Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCH) terkait Operasi dan Sosialisasi bea Cukai (DBHCHT di tempat Usaha kecil dan menegah baik di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. .		mengutamakan sosialisasi sehingga masyarakat muda memahami dalam pemakaian dan peruntukan bea cukai Rokok.
		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
		3.Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelnggaran Perda dan Perkada.		
			Outcome	Outcome		
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan barang milik Daerah pasal 1 ayat 5 tentang sewa pemamfaatan aset milik Daerah dan hasilnya;		
				a. Terlaksananya Operasi Penegakan Perda Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan BPAD untuk menyerahkan Surat Teguran kepada PNS Penghuni Rumah Dinas milik Pemprov.NTT. Atas nama saudara Johan	Pegawai Atas nama Johan Saekoko tidak menunasi tunggakan pembayaran Rumah Dinas dan Saudara	Sat PolPP (bidang Penegakan) membuat Surat Peringatan

				<p>Saekoko sesuai perda nomor 12 tahun 2018 Tentang Pengelolaan barang milik Daerah pasal 1 ayat 5 tentang sewa pemamfaatan Milik Daerah.</p> <p>b. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Badan Aset untuk melakuakn pengamanan penyerahan surat peringatan ASN dinas perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan Pembayaran Penundaan rumah Dinas atas nama saudara Abiel Klaping sebanyak sebanyak 1 kali;</p> <p>c. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja dan badan Aset melakukan Penertiban kepada Masyarakat (Okupan) sebanyak 4 KK (Yanti,Kusuma, Sitti Halija,Yosiman Banoet,Khadijah Abubakar Yakni Saudara Nofri yang melakukan Aktivitas (membangun kios) di Aset tanah Prov.NTT di lokasi manulai 1 kali;</p>	<p>kepada Johan Saekoko untuk cepat melunasi pemabayaran</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>d. Terlaksananya Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan hasilnya lokasi Jalan Timor Raya KM 8 Kel Oesapa Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>e. Terlaksananya Operasi Penegakan perda Aset Tanah milik Pemerintah provinsi dan hasilnya Satuan Polisi pamong Praja bersama badan Aset melakukan Penertiban Masyarakat Okupasi sekaligus Penertiban pemasangan Plan di aset milik Prov.NTT dilokasi Desa Mata Air Kab Kupang sebanyak 1 Kali;</p> <p>f. Telaksananya Operasi Aset milik pemerintah Prov.NTT dan hasilnya Satuan Polisi pamong Praja melakukan pemantauan Aset RSJ, Naimata Kupang,bajadek. Sebanyak 3 kali;</p> <p>g. Terlaksananya Operasi Penertiban Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Badan Aset milik Prov.NTT melakukan penertiban Pegawai Rumah Sakit Umum W.Z Yohanes</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				untuk mengosongkan (Mess Pegawai RSUD Prov Dr W.Z Yohanes Kupang sebanyak 1 kali;		
				2. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan yakni;		
				<p>a. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Biro Umum melaksanakan Penertiban PKL yang menjual kelapa muda didepan BPK Provinsi dan di Relokasikan ke jalan Polisi Militer.</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja bersama intelejen Kejaksaan .NTT dalam melakukan pengecekan Masyarakat menjuakl Aset Tanah HPL nomor 3 Tahun 1986 di Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang</p>		
				3. Operasi Penegkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 58 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCH) dan hasilnya (DBHCH) hasilnya Terlaksananya Operasi DBHCH bersama instasi		

				lain yakni Badan Keuangan, sebagai Sekber , Badan Bea cukai , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.NTT, Satuan Polisi Pamong Praja kota Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang sehingga menemukan Pelanggaran Peruntukan Rokok dan Lebel Bea Cukai di Lokasi Kota Kupang,dan kabupaten Kupang;		
		Kegiatan	Out put :	Output :		
3		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam rangka mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan hasilnya	Belum berjalannya Sekretariat PPNS	Sat Pol PP melakukan Rakor PPNS untuk kolaborasi dalam penegakan Perda dan Pergub dalam peningkatan PAD.
			Outcome	Outcome		
		Terlaksananya Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas (PPNS) untuk mendukung indikator meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Jumlah PERDA yang ditegakan) dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja (bidang gakda) dalam melakukan Rapat Koordinasi dan melakukan Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama Perangkat Daerah yang ada memiliki PPNS dengan tujuan yakni meningkatkan kerjasama dalam menegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.		

	KEGIATAN		TARGET	REALISASI	MASALAH	SOLUSI
III	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN KEBAKARAN		Rp.7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-(100)%		
	KEGIATAN					
		PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	Rp.7.000.000,-	Rp. 7.000.000,- (100)%	Masalah kegiatan ini adalah Belum tersedia Data kebakaran dan Non Kebakaran dari 22 kabupaten/Kota Se- NTT.	Sat Polpp Tetap berkoordinasi dan membuat Surat ke Sat Pol PP kabupaten untuk mengirim data Anggota Damkar
	Sub Kegiatan					
		Sub Kegiatan	Out put :	Output :		
			Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		
			Outcome	Outcome		
			Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan hasilnya ; Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten	Belum tersedia Data untuk Pemuktahiran kebakaran dan Non Kebakaran	Sat Polpp Tetap berkoordinasi dan membuat Surat ke Sat Pol PP kabupaten untuk mengirim data

				<p>Kota yang di hadiri oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo,Belu,Malaka, Ende Manggarai Barat, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Kota Kupang dari 22 Kabupetn /Kota dan hasil yang di capai dalam Rekomendasi sebagai Berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilukada serentak aman dan damai <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Tim Satgas Damkar dalam membantu Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024. di Kabupaten/Kota; b. Pemamfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan ,pengawalan Situasi Trantibum damkar melalui Link https://bit SIKETIMUNMAS Sat Pol Prov.NTT; c. Membangun Koordinasi ,Komonikasi dan Kolaborasi Secara berkelanjutan antara anggota damkar 2. Invetarisasi Data Damkar Se Kabupaten/ Kota <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian instrumen data Kebutuhan Sarpras Damka 		<p>Anggota Damkar serta serta fasilitas sarpras yangtersedia.</p>
--	--	--	--	--	--	---

			Out put :	Output :		
			Penyediaan informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			
			Outcome	Outcome		
			Penyediaan informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Penyediaan Informasi daerah Rawan dan Peta Rawan Kebakaran hasilnya Satuan Polisi pamong Praja melakukan Rakor Pemetaan daerah Rawan Kebakaran dan Non Kebakaran namun data yang tersediannya Dyakni Kota Kupang, kabupaten Kupang, kabupaten Sabu Raijua, kabupaten Rote Ndao sedangkan Kabupaten lainbelum ada data damkar;	Belum tersedia data Damkar dari 18 kabupaten dari 22 kabupaten untuk membuat Peta wilayah yang berpotensi kebakaran	Satuan Polisi pamong Praja berkoordinasi dan membuat Surat ke Sat Pol PP kabupaten

3.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

NO	Indikator	Kegiatan	Hasil capaian kegiatan
1.	Meningkatnya Pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;	<p>1. Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan; dengan hasilnya Terlaksananya Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI) selama 1 x24 jam dalam 1(satu) Tahun yang di bentuk dalam 3 Regu untuk 7 titik pos selama 1 (selama satu) Tahun Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 Pos Rumah Kediaman Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan hasilnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Rumah Jabatan Gubernur; 2. Pos Rumah Jabatan Wakil Gubernur; 3. Pos Rumah Jabatan Sekretaris Daerah; 4. Pos Kantor Satpol PP Provinsi NTT;

		<p>Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.</p>	<p>2. Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. dan hasilnya Penertiban dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 6 <i>Kali</i> dengan jumlah masyarakat yang mendapat dampak penertiban dalam aset Prov.NTT berjumlah 4 KK dengan rincian kegiatan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja dan badan Aset melakukan Penertiban kepada Masyarakat (Okupan) sebanyak 3 KK yang melakukan Aktivitas (membangun kios) di Aset tanah Prov.NTT di lokasi manulai sebanyak 1 kali; b. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Badan Aset untuk melakuakn pengamanan penerahan surat peringatan ASN dinas perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan Pembayaran Penundaan rumah Dinas atas nama saudara Abiel Klaping sebanyak sebanyak 1 kali; c. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja dan badan Aset melakukan Penertiban kepada Masyarakat (Okupan)
--	--	---	--

			<p>sebanyak 4 KK (Yanti,Kusuma, Sitti Halija,Yosiman Banoet,Khadijah Abubakar Yakni Saudara Nofri yang melakukan Aktivitas (membangun kios) di Aset tanah Prov.NTT di lokasi manulai sebanyak 1 kali;</p> <p>d. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan Pengamanan dan penertiban Masyarakat yang melakukan pemamfaatan Aset tanah dan gedung Lokabinkra Prov.NTTT di lokasi Jalan Timor Raya KM 8 Kel Oesapa Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>e. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan Pengamanan Masyarakat Okupasi Aset tanah Prov.NTT sekaligus Penertiban pemasangan Plan di aset milik Prov.NTT dilokasi Desa Mata Air Kab Kupang sebanyak 1 Kali.</p> <p>f. Terlaksananya pemantauan sekaligus Patroli serta Pemantauan Aset milik Prov.NTT yakni Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, Aset Tanah di bajadek, Kota Kupang sebanyak 2 kali;</p> <p>g. Terlaksananya Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Badan Aset milik Prov.NTT melakukan penertiban 1 KK Pegawai Rumah Sakit Umum W.Z</p>
--	--	--	---

			Yohanes untuk mengosongkan (Mess Pegawai RSUD Prov Dr W.Z Yohanes Kupang sebanyak 1 kali;
			Kegiatan yang mendukung kegiatan sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Yakni
			<p>A. Terlaksananya kegiatan Pengamanan Pejabat VVIP dan VIP dan tamu penting lainnya berjumlah 29 kali dengan dengan jumlah pejabat yang mendapat pengawalan, sekaligus pengamanan sebanyak 650 orang dengan hasilnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Gubernur. NTT dalam rangka patroli pemantauan pencoblosan pemilu tahun 2024 lokasi Perumnas (kota Kupang) sebanyak 1 kali; 2) Melakukan pengamanan Gladi Kotor dan Bersih dalam Persiapan Pelantikan Pejabat Bupati Rote Ndao manggarai Timur, TTS di lokasi Aula El Tari Kupang sebanyak 1 Kali; 3) Melakukan pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Rote Ndao manggarai Timur, TTS di lokasi Aula El Tari Kupang jumlah peserta 150 orang sebanyak 1 kali;

			<ol style="list-style-type: none"> 4) Melakukan Pengamanan Tim dari Kementrian Dalam Negeri untuk membahas upacara penyelesaian Tumpang tindih hak pada tanah sertifikat di lokasi Stasiun Bumi (Getaway jaringan Satelit RI di Kupang) di lokasi manulai II (Rumah Sakit Nasional Ben Mboi);sebanyak 1 kali. 5) Melakukan pengamanan dalam rangka pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan Tinggi pratama linkup Prov.NTT di Lokasi Aula fernandes sebanyak 1 kali; 6) Melakukan Pengamanan kegiatan RUPS (rapat Umum Pemegang Saham Iflasi dan Pergantian Direksi Bank NTT di aula El Tari sebanyak 1 kali; 7) Melakukan Pengamanan Kegiatan jamuan makan malam Pj Gubernur dan Uskup agung kupang dbeserta undangan jumlah 500 orang di lokasi kantor Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali; 8) Melakukan Pengamanan Kunjungan Kerja PJ Gubernur di lokasi Bank NTT sebanyak 1 kali; 9) Melakukan persiapan Pengamanan Gladi bersih dan kotor Pelantikan PJ Lembata dan Flotim di aula El Tari sebanyak 1 Kali 10) Melakukan Pengamanan Pengambilan Sumpah jabatan pelantikan flores Timur dan Lembata di Aula El Tari sebanyak 1 kali
--	--	--	---

			<p>11) Melakukan Pengamanan Jamuan Makan Malam PJ dan Forkopinda NTT di Rumah jabatan Gubernur Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>12) Melakukan Pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Sumba Barat Daya di lokasi Aula El tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>13) Melakukan pengamanan dan mengikuti kegiatan Deklarasi Netralisasi ASN/TNI Polri Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di prov.NTT di lokasi Aston Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>14) Melakukan Pengamanan dan mengikuti Undangan Apel Gelar Pasukan pengamanan dalam rangka Kunker Presiden RI dan Rombongan ke Wilayah NTT di lokasi wirasakti kupangsebanyak 1 kali;</p> <p>15) Melakukan Pengamanan PJ Gubernur NTT dalam rangka kunjungan Kerja di lokasi Qi Bolok, PT.Flobamora ,Bank NTT, jam Krida , Gereja Menara Kesaksian Fatululi sebanyak 5 kali;</p> <p>16) Melakukan pengamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat paripurna peresmian peresmian pengambilan sumpah sumpah janji pimpinan DPRD Prov. NTT masa jabatan tahun 2024-2029 dan Tamu Tamu dari RI dan Konsultan RDTLsebanyak 1 Kali;</p> <p>17) Melakukan Pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Nagekeo, oleh pejabat Gubernur NTT dan Tamu undangan Lainnya sebanyak 1 kali;</p>
--	--	--	---

			<p>18) Melakukan Pengamanan dan Pengawasan kunjungan Kerja meneteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bapak Pratikno Bandara El tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>19) Melakukan Pengamanan Melakukan Pengamanan Forkompinda dan bidang teknis penanganan Bencana dan mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Pasca bencana Eropsi Gunung Lewotobi laki-laki dan Konflik Sosial di kab Flotim diruangan PJ gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>20) Melakukan patroli bersama TNI Polda NTT dan Pengamanan PJ Gubernur dalam Rangka Pemantauan Pemungutan suara di Kota Kupang dan oesao (kab Kupang) TPS.-TPS sebanyak 2 kali</p> <p>21) Melakukan Pengamanan Tamu VVIP Area Acara kegiatan Parade Tenun ikat NTT serentak di Prov.NTT di sepanjang jalan El tari Kupang sampai rumah jabatan sebanyak 1 kali;</p> <p>22) Melakukan pemantauan pengawasan dan patroli bersama Forkopinda dalam rangka pengecekan pos pengamanan malam pergantian tahun 2024-2025 di wilayah Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>23) Melakukan pengamanan dan pengawasan PJ Gubernur dan patroli penertiban Baliho bersama Pol PP Kota di kota Kupang di Kota Kupang sebanyak 1 kali</p>
			<p>B. Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Demonstrasi Aksi Unjuk Rasa dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi</p>

			<p>untuk menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan hasilnya yakni menjaga Demostrasi Aksi unjuk rasa dari masyarakat dan mahasiswa di Kantor Gubernur dan DPRD sebanyak 14 kali dengan jumlah masyarakat dan mahasiswa yang mendapat pelayanan sebanyak 720 Orang dengan rincian kegiatan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Pengamanan Aksi unjuk rasa dari LMND (liga mahasiswa Nasional untuk Demonstrasi Eksekutif Kota Kupang terkait kasus Tenaga Kerja Kesehatan di depan kantor Gubernur NTT Jumlah Pendemo sebanyak 30 Orang; sebanyak 1 kali; 2) Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa /demonstrasi Konferensi Serikat Buruh sejarah indonesia (KSBSI) jumlah masyarakat dan mahasiswa sebanyak 200 Orang di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali; 3) Melakukan Pengamanan aksi unjuk Rasa Demonstrasi mahasiswa Nasional (From Mahasiswa (FMN) terkait Milik Warga kab Lembata di depan kantor gubernur Jumlah Pendemo 60 Orang sebanyak 1 kali; 4) Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa demonstrasi dari mahasiswa terkait Upah buruh di kab manggarai berjumlah 65 orang depan kantor Gubernur NTT sebanyak 2 kali;
--	--	--	--

			<p>5) Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa demonstrasi mahasiswa dari aliansi FMN terkait Farmasi Akpol di DPRD prov.NTT berjumlah (30 Orang) sebanyak 1 kali;</p> <p>6) Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /demonstrasi tentang Penolakan Rektor IAKN Kupang dari Luar NTT jumlah pendemo 30 orang di DPRD prov.NTTsebanyak 2 kali;</p> <p>7) Melakukan Pengamanan Demonstrasi dari mahasiswa FMN dan masyarakat di DPRD Prov.NTT berjumlah 35 Orang sebanyak 1 kali;</p> <p>8) Melakukan pengamanan Aksi unjuk Rasa /demonstrasi dari wartawan terkait penolakan Undang-undang OPERS. Jumlah 10 Orang di depan kantor gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>9) Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /Demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat Besipae (jumlah pendemo 100 Orang) depan kantor Gubernur NTT;sebanyak 2 Kali;</p> <p>10) Melakukan pengamanan Aksi unjuk rasa Demonstrasi dari fraksi Mahasiswa dari Undana Terkait penolakan geothermal di wilayah adat poco leok di manggarai Jumlah pendemo 50 orang di DPRD prov.NTT sebanyak 2 kali;</p> <p>11) Melakukan Pengamanan demonstrasi Aksi unjuk Rasa Forum mahasiswa dari undana terkait Terkait dengan Mafia BBM di NTT di DPRD Prov.NTT Jumlah 35 orang sebanyak 1 kali;</p>
--	--	--	--

			<p>12) Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /Demostrasi dari Forum Mahasiswa dan Aliansi LMND jumlah Pendemo 30 Orang di DPRD prov.NTT sebanyak 1 kali;</p>
			<p>C. Terlaksananya Pengamanan dan Patroli Hari – hari besar Keagamaan dan Nasional sebanyak 17 Kali dengan rincian kegiatan sebagai berikut</p> <p>1) Melakukan Pengamanan Upacara HUT RI HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di lokasi depan lapangan Walikota Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>2) Melakukan Operasi dan patroli serta pemantauan gabungan dalam rangka Mantap Brata Turangga dalam menjelang idul Fitri sebanyak 1 kali;</p> <p>3) Melakukan Ope1rasi Patroli dan pemantaian gabungan bersama Kapolda NTT dalam rangka malam Takbiran Hari raya Idul Fitri 1445 H sebanyak 1 kali</p> <p>4) Melakukan Pengamanan dalam Rangka Acara Anak nasional tahun 2024 di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>5) Melakukan Pengamanan Renungan suci dalam rangka memperingati HUT RI ke 79 kemerdekaan indonesia sebanyak 1 kali;</p> <p>6) Melakukan Pengamanan dalam rangka memperingati hari Lahir pancasila di Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 Kali</p>

			<p>7) Melakukan Pengamanan kegiatan memperingati hari lanjut Usia Nasional ke 28 tahun dan hari Lanjut Usia Prov.NTT ke 11 di lokasi depan kantor Gubernur prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>8) Melakukan pengamanan dalam rangka Kegiatan Sholat Idul Adha 1445 H tahun 2024 di lokasi Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>9) Melakukan Pengamanan rangka Detik –detik memperingati HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Alun – alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>10) Melakukan Pengamanan Penurunan dalam bendera Merah Putih HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Alun – alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>11) Dalam Melakukan Pengamanan kupang Exotic Run Tahun 2024 dalam rangka lomba lari 5K dan 10 K dan festifal depan kantor Gubernur Jalan El tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>12) Melakukan Pengamanan untuk menjaga Trantibum dalam rangka gladi Pengambilan janji Sumpah anggota DPRD Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>13) Melakukan Pengamanan untuk menjaga gladi Pengambilan janji Sumpah anggota DPRD Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p>
--	--	--	---

			<p>14) Melakukan Pengamanan dan Mengikuti Apel Memperingati hari Perhubungan nasional TK Prov.NTT sekaligus di satukan bapel kesadaran Llingkup Prov.NTT lokasi terminal Type A bimoku Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>15) Melakukan Pengamanan dalam rangka Upacara Peringatan hari Pahlawan Nasional di lokasi Darmaloka pasir panjang Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>16) Melakukan Pengamanan dalam rangka Upacara Peringatan hari Pahlawan Nasional diAlun –alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>17) Melakukan Pengamanan Upacara Hari Korpri Nasional di depan halaman kantor Gubernur NTT di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p>
			<p>D. Terlaksananya Operasi penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) kali;dengan hasilnya</p> <p>1) Terlaksananya Pengamanan dan Penertiban bagi ASN yang mengikuti Apel Kesadaran dari 39 Perangkat daerah di Depan kantor Gubernur . NTT setiap tanggal 17 dalam bulan berjalan sebanyak 12 kali ;</p> <p>2) Melakukan Pengamanan mencegah gangguan Trantibum bagi ASN Pada Jam Dinas di Dinas Perikanan sebayak 1 kali;</p>

			<p>3) Melakukan Penertiban ASN yang Mabuk Di UPTD sesuai Pengaduan Ibu Yolanda PNS di UPTD di taman Budaya dinas PK Prov.NTT sebanyak 1 Kali</p>
			<p>E. Terlaksananya Kegiatan pengamanan dalam menjaga Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 60 Kali terhadap masyarakat dengan jumlah 910 orang dengan rincian sebagai berikut;</p> <p>1) Melakukan Pengamanan deteksi dini dan Cegah dini Gangguan untuk menjaga Trantibum dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa /Rohani bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian Kinerja (P3K) rumah Sakit Jiwa sebanyak 1 kali;</p> <p>2) Melakukan Pengamanan deteksi dini dan Cegah dini untuk menjaga Gangguan Trantibum dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa /Rohani bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian Kinerja (P3K) sebanyak 515 Orang di lokasi rumah sakit jiwa sebanyak 1 Kali;</p> <p>3) Melakukan pengamanan untuk menjaga trantibum terhadap tindakan persuasif dan Penertiban PKL serta Pemindahan bagi pedagang kaki (PKL) lima yang berjualan di samping kantor gubernur NTT sekaligus memindahkan ke tempat yang di sediakan sebanyak 2 kali;</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 4) Melakukan Pengamanan dalam menjaga Trantibum dalam rangka Gladi bersih bersama sat polpp kota kupang dalam rangka upacara gelar pasukan HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di lokasi depan Lapangan Wali Kota Kupang sebanyak 1 kali; 5) Melakukan Pengamanan dalam menjaga trantibum untuk mengikuti gelar pasukan HUT upacara gelar pasukan HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di depan halaman Kantor walikota Kupang sebanyak 1 kali; 6) Melakukan Pengamanan dan menjaga Trantimum dalam rangka Gladi Kotor dan bersih dalam rangka memperingati hari Lahir pancasila di Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 Kali; 7) Melakukan Pengamanan dalam menjaga Trantibum Olah Raga Tingkat Prov.di depan kantor Gubernur Sasando sebanyak 1 kali; 8) Melakukan Pengamanan dalam rangka menjaga Trantibum dalam rangka Penyerahan SK P3k oleh Setda bagi 145 orang untuk guru SMA,SMK,dan SLB tingkat Prov.NTT di depan halaman kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali; 9) Melakukan Pengamanan serta mengikuti upacara Gelar Pasukan Operasi Turangga untuk menjaga ketenteraman dan Ketertiban Umum di kota kupang di lapangan polda NTT sebanyak 1 kali; 10) Melakukan Pengamanan dalam rangka menjaga Trantibum dalam Rapat Operasi DBH-CHT (dana Bagi hasil Bea Cukai Rokok 4 kali;
--	--	--	---

			<p>11) Melakukan Pengamanan Pari Purna di DPRD Prov.NTT dalam menjelang terakhir DPRD Prov.NTT sebanyak 20 kali;</p> <p>12) Melakukan Pengamanan Penganugrahan tanda Kehormatan Satya Lencana Karya 10 Tahun 20 tahun dan 30 tahun tahun 2024 di aula El Tari Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>13) Melakukan Pengamanan Pelepasan Kontigen NTT menuju PON XXI /2024 Aceh Sumut di aula El tari Kupang sebanyak 1 Kali;</p> <p>14) Dalam Melakukan Pengamanan kupang Exotic Run Tahun 2024 dalam rangka lomba lari 5K dan 10 K dan festival El Tari Kupang sebanyak 1 kali.</p> <p>15) Melakukan Pengamanan gladi dalam rangka memperingati Detik – detik HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Aula jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>16) Melakukan Pengamanan Kegiatan Turnamen Voly Putra antar Perusahaan Daerah (BUMD, BUMN se Kab/Kota Prov.NTT Kantor Gubernur Lama jl Basuki Rahmat prov.NTT sebanyak 6 kali;</p> <p>17) Melakukan Pengamanan Olah Raga Tingkat Prov.di depan kantor Gubernur .Sasando sebanyak 1 kali;</p> <p>18) Mengikuti rapat Persiapan Trantibum terkait hari kesaktian pancasila tahun 2024 tingkat prov.NTT di Ruang Asisten senbanyak 1 Kali.</p>
--	--	--	--

			<p>19) Melakukan Pengamanan Gladi Resik dalam rangka memperingati HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di alun –Alun Rumah Jabtan Gubernur NTT sebanyak 2 kali;</p> <p>20) Melakukan Pengamanan untuk menjaga Trantibum dalam rangka Gladi sekaligus Operasi Mantap Praja Turangga 2024 NTT dalam rangka Pemilukada di lapangan Polda NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>21) Melakukan Pengamanan Sosialisasikan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di lokasi Biskop Plasa Hotel sebanyak 1 kali;</p> <p>22) Melakukan Pengamanan dan mengikuti Latihan Posko I tatp muka II korem 161 Wirasakti sebanyak 1 kali;</p> <p>23) Melakukan pengamanan dan mengikuti Gelar pasukan dalam rangka Operasi zebra Turangga 2024 di lapangan Polda NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>24) Melakukan dan mengikuti kegiatan latihan Penanggulangan Berencana alam Di Lokasi Korem 161 Wirasakti kupang senbanyak 1 kali ;</p> <p>25) Melakukan Pengamanan dan mengikuti SKD CPNS lingkup prov.NTT tahun 2024 di BKD Prov.NTT sebanyak 1 kali</p> <p>26) Melakukan Pengamanan Gladi Upacara Hari Korpri Nasional di depan halaman kantor Gubernur NTT di depan kantor Gubernur prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>27) Melakukan Pengamanan sekaligus mengikuti Upacara Ziarah di lokasi Darmaloka pasir panjang kota sebanyak 1 kali;</p>
--	--	--	--

			<p>28) Melakukan patroli Gabungan bersama TNI,polda NTT dan Pemantauan deteksi dini ,cegah dini gangguan Trantibum dalam rangka rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemungutan suara di TPS sekaligus pengecekan Kesiapan Pengamanan Tahap Pengumutan suara di wilayah kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>29) Melakukan Pengamanan Kegiatan DWP Prov.NTT (Perekam KTP Elektronik Aktivitas Identitas Kependudukan Digital dan Kartu identitas Anak serta Geiatan Donor Darah sebanyak 1 kali;</p> <p>30) Melakukan pengamanan dan Mengikuti Kegiatan Apel Kesadaran dan Gelar pasukan dalam Rangka Siaga bencana Tahun 2024 sebanyak 1 kali;</p> <p>31) Melakukan Pengamanan dan mengikuti UpacaraPenerimaan SATGASPUR yunif 74 Garuda nusantara dalam rangka tugas operasi pamtas RI –RDTL periode 2024-2025 sebanyak 1 Kali;</p> <p>32) Melakukan Pengamanan rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pilkada di KPU Prov.NTT sebanyak 1 kali;</p> <p>33) Melakukan pengamanan kegiatan jalan santai dan pengamanan panggung hiburan oleh kurang lebih 250 orang serta penyandang Sabilitas di kota Kupang di sepanjang jalan El tari sampai Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 kali;</p>
--	--	--	--

			<p>34) Melakukan pengamanan pemberian bantuan bagi anak asuh di kelurahan lasianan di Kelurahan lasianan sebanyak 1 kali;</p> <p>35) Melakukan pemantauan dan patroli bersama Forkopinda dalam rangka pengecekan pos pengamanan malam pergantian tahun 2024-2025 di Kota Kupang sebanyak 1 kali</p>
			<p>F. Terlaksananya Kegiatan Operasi reaksi cepat sebanyak 1 Kali dengan hasilnya; Melakukan pengamanan Kebakaran kantor UPTD pertanian di UPTD Dinas Pertanian Prov NTT di Lokasi air Nona sebanyak 1 Kali</p>
			<p>3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi dan hasilnya Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan Rapat koordinasi Konsolidasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Satuan Polisi Pamong Praja se - Kabupaten/Kota untuk menjaga Ketententeraman dan Keteriban Umum dalam rangka Pemilukada Presiden dan wakil Presiden dan DPRD, DPD, DPRD RI, serta Pemilukada Bupati dan Wali Kota di hotel Pelangi Kupang sebanyak 1 Kali</p>

			<p>4. Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan dengan hasil yang di capai yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya koordinasi Lintas kemitraan terkait Penertiban Aset milik Prov.NTT bersama badan Aset milik Prov.NTT tertkait (Rumah Dinas dan Aset tanah lainnya yang di okupasi oleh masyarakat, biak di Kota Kupang dan kabupaten kupang); 2) Terlaksananya koordinasi Lintas kemitraan yakni Kepolisian Nusa Tenggara Timur (Polda.NTT) serta Polresta Kupang Kota terkait Trantibum, pengamanan Demonstrasi di Kantor Gubernur Dan DPRD Provinsi NTT 3) Terlaksananya dan Mengikuti Rapat Koordinasi Rapat kerja sama Operasi menjelang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada , kabupaten/kota dan juga Operasi Menjelang pergantian Tahun 2024 - 2025 di wilayah kota Kupang bersama Forkopinda Daerah Prov.NTT.
			<p>5. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan hasilnya Terlaksananya Penyusunanan revisi Standar Operasional Prodedur (SOP) teknis dan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan Desk bersama Tim Penyusunan SOP Biro Organisasi terkait revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2024.</p>

			<p>6. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan hasilnya Terlaksananya pengambilan data masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda dan perkada di Radius 0-50 Meter di sekitar lokasi Qi Bolok Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT</p> <p>1. Melakukan Sosialisasi Standar pelayanan Minimal (SPM) terkait masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter dari hasil Sosialisasi maka Toko Adat dan masyarakat bersepakat membuat Pernyataan yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat Desa bolok merasa resah terhadap beredarnya informasi terkait sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lahan kawasan yang mana belum semua lahan dilakukan penyelesaianPembayaran. 2) Masyarakat desa bolok tidak dapat melakukan sertifikasi atas lahan miliknya tanpa rekomendasi dari badan Aset milik pemerinth Prov.NTT. 3) Masyarakat desa bolok kehilangan hak atas tanahnya; 4) Masyarakat Menolak untuk menyerahkan data Kependudukan; 5) Meminta Pemerintah daerah / badan Aset Prov.NTT untuk menunjuk batas –batas tanah lokasi kawasan industri bolok;
--	--	--	---

			<p>6) Meminta Pemerintah daerah / badan Aset Prov.NTT untuk pengukuran ulang sehingga mengetahui mana lahan pemerintah dan masyarakat.</p> <p>2. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Bajadek sebanyak 19 KK jumlah masyarakat 101 Orang</p> <p>3. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Besipae sebanyak 23 KK jumlah masyarakat 136 Orang</p> <p>4. Terlaksananya Sosialisasi Fungsi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Lurah Manulai II sekaligus Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Manulai II (rumah Sakit Umum Nasional Ben Mboi) di RT 14,15,22,23 Kota Kupang; jumlah kk 25 KK dan Jumlah masyarakat 108 Orang;</p> <p>5. Terlaksananya Sosialisasi dan pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset milik prov.NTT di Gor Oepoi Kupang jumlah kk sebanyak 11 KK dan jumlah masyarakat 68 orang;</p>
--	--	--	--

			<p>6. Terlaksananya Pemantauan dan pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset milik prov.NTT Sumlili Kabupaten Kupang,Aset Tanah dan Rumah Dinas di obobo, , Aset Tanah di lapangan tenis Kelapa Lima Kota Kupang hasilnya masyarakat tidak mau menyerahkan identitas karena masyarakat ketika melakukan Penertiban tidak ada dampak dan kerusakan fasilitas.</p>
			<p>7. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan hasilnya Terlaksananya Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten Kota yang di hadiri oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo,Belu,Malaka, Ende Manggarai Barat, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Kota Kupang dari 22 Kabupetn /Kota dan hasil yang di capai dalam Rekomendasi sebagai Berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilukada serentak aman dan damai; <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberdayaan Tim Satgas Linmas dalam Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024. di Kabupaten/Kota; ❖ Pemamfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan ,pengawalan Situasi Trantibum linmas melalui Link https://bit.SIKETIMUNMAS Sat Pol Prov.NTT ❖ Membangun Koordinasi ,Komonikasi dan Kolaborasi Secara berkelanjutan antara anggota Linmas

			<p>2. Inventarisasi Data Linmas Se Kabupaten/ Kota yakni Penyampaian instrumen data Kebutuhan Sarana Prasarana</p>
			<p>8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa hak Asasi Manusia dan hasilnya ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami tugas dan fungsi di sertai Latihan Baris Berbaris (Kesemaptaan) di lapangan Sat Polpp Prov.NTT;dengan jumlah peserta 117 orang; 2) Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Jabatan Fungsional di Dirjen Bina Administrasi Kewilayaan Republik Indonesia; 3) Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Jabatan Fungsional sebanyak 63 anggota;

NO	Indikator	Kegiatan	Hasil capaian kegiatan
2.	Meningkatnya Ketertibann Umum dan Ketentraman Masyarakat (Jumlah PERDA yang ditegakan	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan hasil 1 Peraturan Daerah dan 1 (satu) Peraturan Kepala Daerah	
		1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur	Terlaksanananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT melakukan Sosualisasi Peratuaran Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dan ungsi tugas Satuan Polisi pamong Praja di SMA/SMK di Kota Kupang.
		2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Terlaksananya Kegiatan pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCH) terkait Operasi dan Sosialisasi bea Cukai (DBHCHT di tempat Usaha kecil dan menegah baik di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

		<p>3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.</p>	<p>1. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasilnya</p> <p>a. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan BPAD untuk menyerahkan Surat Teguran kepada PNS Penghuni Rumah Dinas milik Pemprov.NTT. Atas nama Johan Saekoko sesuai perda nomor 12 tahun 2018 Tentang Pengelolaan barang milik Daerah pasal 1 ayat 5 tentang sewa pemamfaatan Milik Daerah.</p> <p>b. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Badan Aset untuk melakuakn pengamanan penyerahan surat peringatan ASN dinas perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan Pembayaran Penundaan rumah Dinas atas nama saudara Abiel Klaping sebanyak sebanyak 1 kali;</p> <p>c. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja dan badan Aset melakukan Penertiban kepada Masyarakat (Okupan) sebanyak 4 KK (Yanti,Kusuma, Sitti Halija,Yosiman Banoet,Khadijah Abubakar Yakni Saudara Nofri yang melakukan Aktivitas (membangun kios) di Aset tanah Prov.NTT di lokasi manulai sebanyak 1 kali;</p>
--	--	---	--

			<p>d. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan hasilnya Terlaksananya Operasi Penertiban Masyarakat Aset yang memfaatkan Gedung Lokabinkra milik Prov.NTT di lokasi Jalan Timor Raya KM 8 Kel Oesapa Kota Kupang sebanyak 1 kali;</p> <p>e. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan barang milik Daerah dan hasilnya Terlaksananya Operasi Sekaligus Melakukan Penertiban Masyarakat Okupasi Aset tanah Prov.NTT sekaligus Penertiban pemasangan Plan di aset milik Prov.NTT dilokasi Desa Mata Air Kab Kupang sebanyak 1 Kali;</p> <p>f. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan barang milik Daerah dan hasilnya Satuan Polisi pamong Praja melakukan pemantauan Aset RSJ, Naimata Kupang,bajadek.</p> <p>2. Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Biro Umum melaksanakan Penertiban PKL yang menjual kelapa muda didepan BPK Provinsi dan di Relokasikan ke jalan Polisi Militer.</p> <p>3. Operasi Penegkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 58 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCH) hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Bekerjasama dengan instansi lain yakni kantor Bea Cukai,</p>
--	--	--	--

				<p>Badan Keuangan , Deperindak Provinsi.NTT, Sat Pol PP Kota kupang dan Sat Pol PP Kabupaten Kupang dalam rangka ;Operasi dan Sosialisasi DBHCH kepada Pelaku usaha kecil dan Menengah (KIOS dan TOKO) karena masih terdapat salah peruntukan Pita Bea Cukai dan Peruntukan Produk rokok yang tidak sesuai Aturan di lokasi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.</p>
			<p>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Provinsi</p>	
		2	<p>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p>	<p>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja (bidang penegakan Perda Perkada) dalam melakukan Rapat Koordinasi dan melakukan Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama Perangkat Daerah yang ada memiliki PPNS dengan tujuan yakni meningkatkan kerjasama dalam menegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p>

NO	Indikator	Kegiatan		Hasil capaian kegiatan
3	Cakupan Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran Setiap Tahun		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran	
		1	Penyusunan dan Pemukthiran Rencana Induk sistem proteksi Kebakaran dengan capaiannya;	<p>Terlaksananya Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten Kota yang di hadiri oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo,Belu,Malaka, Ende Manggarai Barat, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Kota Kupang dari 22 Kabupetn /Kota dan hasil yang di capai dalam Rekomendasi sebagai Berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilukada serentak aman dan damai <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Tim Satgas Damkar dalam membantu Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024. di Kabupaten/Kota; b. Pemamfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan ,pengawalan Situasi Trantibum damkar melalui Link https://bit SIKETIMUNMAS Sat Pol Prov.NTT; c. Membangun Koordinasi ,Komonikasi dan Kolaborasi Secara berkelanjutan antara anggota damkar 2. Invetarisasi Data Damkar Se Kabupaten/ Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian instrumen data Kebutuhan Sarpras Damkar

		2	Penyediaan informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Informasi daerah Rawan dan Peta Rawan Kebakaran Hasilnya Penyediaan Informasi daerah Rawan dan Peta Rawan Kebakaran hasilnya Satuan Polisi pamong Praja melakukan Rakor Pemetaan daerah Rawan Kebakaran dan Non Kebakaran namun data yang tersediannya Yakni Kota Kupang, kabupaten Kupang, kabupaten Sabu Raijua, kabupaten Rote Ndao sedangkan Kabupaten lainbelum ada data damkar
--	--	---	--	--

3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA 2023		
	Rekomendasi DPRD Provinsi.NTT Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut perangkat Daerah dalam melaksanakan program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Total Pagu Anggaran yang ditetapkan Rp. 13.708.942.700,- dan Realisasi mencapai sebesar Rp 11.352.634.994 atau 82,81 %. Pencapaian 3 (ketiga) indikator sudah optimal (100%) yakni		
No	Tindak lanjut DPRD Terhadap LKPJ di Tahun Anggaran 2023 yakni	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Salah satu hak dasar publik adalah terjaminnya kehidupan yang aman, tentram, damai dan tertib. Maka posisi Pol PP sangat penting untuk mewakili Negara selalu hadir di masyarakat. Oleh karen itu, pemerintah perlu memfasilitas secara maksimal bagi kerja- kerja Sat Pol PP agar masyarakat merasakan terpenuhinya hak dasar dimaksud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang piket dan pos-pos jaga Satuan Polisi Pamong Praja terbuka 1x24 jam dan siap menerima pengaduan masyarakat. 2. Masyarakat juga dapat melapor jika mengalami kondisi tidak nyaman pada Fecebook: satpolPP Prov.NTT dan website : polppprovntt.id di halamam Lapor saya! 	<p>Tujuan: Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Masalah yang diselesaikan : Masyarakat dapat melaksanakan aktifitas kehidupan dengan aman dan lancar.</p>
2	Sat Pol PP perlu meningkatkan kinerja di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia.	Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri guna peningkatan Sumber Daya Aparatur	<p>Tujuan: Untuk peningkatan pengetahuan Aparatur Satpol PP.Prov. NTT</p> <p>Masalah yang diselesaikan : Aparatur Satpol PP semakin menguasai tugas atau perannya serbagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara minimal.</p>

3,4 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan			
No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan masyarakat	Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tujuan : menjaga Ketenteraman dan kertiban Umum serta Meningkatkan Pengamanan Masalah :Masyarakat belum memahami tugas dan fungsi Sat PolPP
2	Satuan Polisi Pamong Praja Bekerja sama dengan Badan Aset dan pendapatan daerah Prov.NTT , Polri ,Biro Hukum ,Diperindag Prov.NTT ,Sat Pol PP Kabupaten Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang.	Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan : Pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi Masalah: Masyarakat mengokupasi Tanah milik Pemerintah Provinsi di kabupaten/Kota.
3	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama bersama stekholder lain untuk pelaksanaan dan Pengawasan Produk Hukum yakni Dana bagi hasil DBHCH bea Cukai terhadap masyarakat yang salah peruntukan dan Bea Cukai Rokok dan Pita Rokok.	Penegkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 58 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCH)	Tujuan : Untuk melaksanakan Program Nasional terkait produk Hukum di daerah. Masalah: Terdapat Masyarakat masih salah peruntukan Bea Cukai dan dan Pita Rokok

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai Pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam Dokumen Perencanaan Perubahan, meskipun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai hambatan dan kendala, namun telah diupayakan penyelesaiannya sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan. Hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan pakta integritas. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari komponen lain dalam amanat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun komitmen untuk terus meningkatkan kinerja yang sesuai perjanjian kinerja yang telah dibuat dan berjenjang dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Untuk itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 telah memberi informasi mengenai tingkatan capaian kinerja yang secara aktual mencakup input, output dan outcome baik dalam perspektif keberhasilan maupun kegagalan tatkala dibandingkan dengan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Tahun 2024. Sedangkan dalam Tahun 2024 telah ditetapkan 1 sasaran utama dan 3 indikator yang dijabarkan menjadi dalam 3 Program dan 10 Kegiatan serta 30 sub kegiatan yang didanai dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun tingkatan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan mencapai 92,75 %. Dengan rincian Belanja program Penunjang Urusan Pemerintah dengan capaian Realisasi 93,23 % dan Urusan Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai 86,46 % serta Program pencegahan penanggulangan penyelematan kebakran dan penyelematan Non Kebakaran mencapai 100% Ini menunjukkan bahwa Sat Pol PP sudah menunjukkan bahwa efisiensi dalam pemanfaatan anggaran (Real Cost) baik kegiatan Rutin maupun Kegiatan Program sehingga anggaran tersebut disetor kembali ke Kas Daerah maka berpengaruh kepada hasil pencapaian kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun Anggaran sebelumnya.

Secara implisit tingkat pencapaian kinerja untuk Tahun anggaran 2024 sesuai sub kegiatan sebagai yang tidak mencapai 100 % sebagai berikut :

1. Terselenggaranya administrasi Satuan Polisi Pamong Praja secara tertib, efisien, efektif, valid dan representative melalui penataan Sasaran Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas efisien penyelenggaraan tugas – tugas dan komitmen antara Satuan Polisi .Pamong Praja Kabupaten/Kota dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Presentasi pencapaian Kinerja yakni : tidak mencapai 100 % karena pendapatan (fiskal daerah mengalami Penurunan sehingga mempengaruhi Pergeseran atau perubahan yang tidak sesuai Alur Kas awal maka Sub yang tidak terealisasi sampai 100% yakni sebagai berikut :
2. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya mencapai 0 %; .
3. Penyediaan Komponen instalasi Listrik /penerangan Bangunan kantor mencapai 38,19%
4. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai 63,64%
5. Pemeliharaan Aset tetap lainnya mencapai 51,19 %
6. Pemeliharaan /rehabilitas gedung dan bangunan lainnya 60,40 %
7. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan pertauran Gubernur mencapai 60,00%
8. Pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mencapai 11 09%

B Solusi.

1. Berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan selaku sekretariat bersama untuk membahas jenis layanan yang terima masyarakat sehingga dapat terjawab kebutuhan akan pencapaian Standara Pelayanan Minimal .
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Pelatihan Kantor Sendiri

Kopang, 28 Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dr. PETRUS GERAN TAHUK
Pemula Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005



LAPORAN LPPD SATPOL PP TAHUN 2024

Dari hasil yang telah di capai dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari capaian progres yang telah dicapai secara keseluruhan (92,75%) menggambarkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai target sampai kondisi per 31 Desember 2024.
2. Memang masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pencapaian pada belanja penunjang urusan akan tetapi tidak berdampak langsung pada capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nsa Tenggara Timur tahun 2024.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa mendatang, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik secara internal dan eksternal tentang tugas pokok dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pelayanan kepada masyarakat sangat efisien dan efektif.
2. Perlu meningkatkan profesionalisme Aparatur sipil Negara sesuai tugas dan fungsi berdasarkan capaian kinerja masing – masing sesuai dengan perjanjian kinerja berjenjang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kami buat kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan, terutama dalam mengemban tugas sebagai Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB), Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Kupang, 23 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Drs. RETRUS SERAN TAHUK
Pemimpin Muda
NIP.19701231 199101 1 005